

DAFTAR PUSTAKA

Buku Indonesia

- Badan Legislasi DPR RI, Mekanisme Penyusunan Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, (Jakarta: DPR RI, 2015), hlm. 19.
- Backy Krinayudha, Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 185.
- Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992), hlm. 18.
- Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Cetakan Ketiga, (Yogyakarta: FH UII Press, 2006), hlm. 122.
- BEM UNDIP, Rilis Kajian : Upaya Pelemahan dan Catatan Permasalahan KPK, (Semarang: Bidang Sosial dan Politik, 2021), hlm. 11.
- B.Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2008), hlm. 82.
- Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang di Indonesia, (Jakarta : Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm, 31.
- Giri Taufik dan Rahayu, Regulasi Yang Baik : Teori, Praktik, dan Evaluasi (Kumpulan Pemikiran Mengenai Perundang-Undangan Indonesia dari Murid dan Kolega Prof. Dr. Bagir Manan, S.H, M.C.L., (Sumedang : UNPAD Press, 2021). hlm. 318.
- John M. Echols, Dictionary of Law, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 353.
- Kurnia Ramadhana, Agil Oktaryal, 2020, Laporan Penelitian Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi Menelisik Pengesahan Revisi Undang-Undang KPK, hlm. 27.
- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi. (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 322-323.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 26.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 97.

Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1998), hlm. 19.

Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 79.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2012), hlm. 7.

Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah sebuah pengantar ke arah kajian sosiologi hukum (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 51.

Buku Asing

Christopher M. Davis, 2015, Expedited or Fast Track Legislative Procedures”, Congressional Research Service Informing the legislative debate since 1914.

House of Lord Select Committee on the Constitution, Fast Track legislation : Constitutional Implications and Safeguards – Volume 1 : Report”, hlm. 7

S.A Walkland, 1968, The Process in Great Britain, Frederick A.Praeger Publisher, New York Washington, hlm, 21.

Molly Elizabeth Reynolds, Exceptions to the Rule : Majoritarian Procedures and Majority Party Power in the United States Senate”, Dissertation for the degree of Doctor of philosophy, hlm. 2.

New Zealand House, Standing Order 95A 1903”, House of Lords Select Committee On the Contitution, Fast Track Legislation : Contitutional Implications and Safeguards, Lihat Ibnu Sina Chandranegara, *Op.cit*, hlm. 130.

Jurnal

Ahmad Yusup, “Analisis Perubahan Ketiga Undnag-Undang Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”. *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, Desember 2022. hlm. 157.

Arfa’i, DKK, “Aktualisasi Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang”. *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2020. hlm. 382.

- Ario Andika Baskoro, Dona Budi Kharisma, “Analisis Undang-Undang IKN Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 3, 2022, hlm. 572
- Bayu Aryanto dan DKK, “Menggagas Model *Fast Track Legislation* Dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang di Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2021, hlm. 188.
- Dhanang Alim Maksum, “Tugas dan Fungsi Wakil Presiden di Indonesia”, *Jurnal Lex Crimen Vol.IV/No. 1/Januari-Mar/2015*, hlm. 125.
- Ibnu Sina Chandranegara, “Pengadopsian Mekanisme *Fast Track Legislation* Dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang oleh Presiden”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21, No. 1, Maret 2021, hlm. 130.
- Marsudi Dedi Putra, “Pembentukan Undang-Undang Jalur Cepat (*Fast Track Legislation*)”, *Maksigama : Vol. 15, No. 2, Periode November 2021*, hlm. 90.
- Muhammad Fadli, “Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat”, *Journal Legislasi Indonesia Vol. 15, No. 01 – Maret 2018*, hlm. 49.
- Muchlisin, “Kedudukan Serta Fungsi DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia”, *Jurnal Mimbar Yustitia*, Vol. 3, No. 2 Desember 2019, hlm. 125.
- Nor Fadillah, “Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara”, *Jurnal Lex Renaissance*, No. 2, Vol. 7, April 2022, hlm. 253.
- Ramanata Disurya, DKK, “Pelanggaran Asas Dalam Penyusunan dan Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Solusi*, Vol. 19, No. 1, Januari 2021, hlm. 33.
- Zhaudiva Azzahra dan Rahayu Subekti, “Teori Legislasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja”. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2022, hlm. 127.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 12 Tahun 2011

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014

Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang

Naskah akademik Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. hlm. 13.

Skripsi, Tesis dan Disertasi

Anis Ibrahim, 2008, “Legislasi dalam Perspektif Demokrasi : Analisis Interaksi Politik dan Hukum Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Jawa Timur”, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 144.

Muhammad Fazri Rivai, Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Qada’iyyah, Tesis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 2

Azmi Fathu, Studi Kritis Praktik *Fast Track Legislation* Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Perspektif *Siyasah Tasyri’iyah*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022, hlm. 53.

Sumber lain

Abdurrahman Naufal, 2021. “Perjalanan Omnibus Law Cipta Kerja Hingga Menjadi UU”. <https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-omnibus-law-cipta-kerja-hingga-menjadi-uu#:~:text=Indonesiabaik.id%20%2D%20>

Rancangan%20Undang%2D,5%2F10%2F2020). Diakses pada 27 Maret 2022.

DPR RI, 2016, “Tugas dan Wewenang”, [https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang#:~:text=Terkait%20dengan%20fungsi%20legislasi%2C%20DPR,Rancangan%20Undang%2DUndang%20\(RUU\)](https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang#:~:text=Terkait%20dengan%20fungsi%20legislasi%2C%20DPR,Rancangan%20Undang%2DUndang%20(RUU)). Diakses pada 5 Januari 2023

Genta TenRI Mawangi, 2022 “Indonesia Parliamentary Center : UU IKN Minim Partisipasi Publik”.<https://www.antaranews.com/berita/2658269/indonesian-parliamentary-center-uu-ikn-minim-partisipasi-publik>. Diakses pada 27 Maret 2022.

Gabriel, 2021, “Pengertian Eksekutif dalam Sebuah Pemerintahan maupun Perusahaan”, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-eksekutif/>. Diakses pada 4 Januari 2023.

Hukum online, 2022. “Mengenal Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/lembaga-eksekutif-legislatif-dan-yudikatif-lt61d3e9d0ba550/>. Diakses pada 8 Oktober 2022

Indonesiabaik.id, 2020, “Prosedur Dalam Penyusunan UU Cipta Kerja”, <https://indonesiabaik.id/infografis/prosedur-dalam-penyusunan-uu-cipta-kerja>. Diakses pada 9 Januari 2023.

Kompas.com, “Pejabat Setingkat Menteri”, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/21/02000031/pejabat-setingkat-menteri>. Diakses pada 5 Januari 2023.

Law Insider, “Urgent Motion Definitions”, <https://www.lawinsider.com/dictionary/urgent-motion>. Diakses pada 16 Januari 2023.

Mahkamah Konstitusi, 2022, “Ahli dan Saksi Pemerintah Jelaskan Proses Pembentukan UU P3”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18533>. Diakses pada 10 Januari 2023.

Mahkamah Konstitusi RI, 2022, “Revisi UU P3 Dinilai Tak Memenuhi Syarat”, <https://kawanhukum.id/fast-track-legislation-suatu-gagasan-dalam-pembentukan-undang-undang-di-indonesia/#:~:text=Fast%20Track%20Legislation%20merupakan%20proses,cepat%20sehingga%20menimbulkan%20kesan%20serampangan>. Diakses pada 13 Desember 2022.

Mahkamah Konstitusi, 2021, “Tanggung Beban Berat, DPR Diminta Klarifikasi Perihal Keterlibatan Hakim Konstitusi dalam Revisi UU MK”.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17456&menu=2>. Diakses pada 8 Januari 2023.

Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2020, “Lima Argumen Revisi UU KPK Cacat Hukum dan Harus Dibatalkan”. <https://pshk.or.id/rr/lima-argumen-revisi-uu-kpk-cacat-hukum-dan-harus-dibatalkan/>. Diakses pada 1 November 2022.

Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2021, “Revisi UU Mahkamah Konstitusi Dinilai Cacat Formil”. <https://pshk.or.id/aktivitas/revisi-uu-mahkamah-konstitusi-dinilai-cacat-formil/>. Diakses pada 1 November 2022.

Torando Edwan, 2022, “*Fast Track Legislation*, Suatu Gagasan Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia”. <https://kawanhukum.id/fast-track-legislation-suatu-gagasan-dalam-pembentukan-undang-undang-di-indonesia/#:~:text=Fast%20Track%20Legislation%20merupakan%20proses,cepat%20sehingga%20menimbulkan%20kesan%20serampangan>, Diakses pada 13 Desember 2022.

Wahyu Wachid, 2019, “KPK Tak Pernah Dilibatkan dalam Revisi UU KPK”, <https://www.gatra.com/news-442504-politik-kpk-tak-pernah-dilibatkan-dalam-revisi-uu-kpk.html>. Diakses pada 8 Januari 2023.

YLBHI, 2022, “Revisi Kedua UU Nomor 12 Tahun 2011, Sebagai Upaya Justifikasi Boroknya UU Cipta Kerja”, <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/revisi-kedua-uu-nomor-12-tahun-2011-sebagai-upaya-justifikasi-boroknya-uu-cipta-kerja/>. Diakses pada 10 Januari 2023.

Gramedia Blog, 2021, “Pengertian APBN : Fungsi, Struktur, Dasar Hukum dan Mekanisme Penyusunannya”, <https://www.gramedia.com/literasi/apbn/>. Diakses pada 21 Januari 2023.

Kemenkumham, “Revisi UU Melemahkan KPK”, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2232:revisi-uu-melemahkan-kpk&catid=111&Itemid=179. Diakses pada 11 Januari 2023.